

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GURU PENGGERAK TERHADAP PENINGKATAN KOMPETENSI GURU DI SMP NEGERI SE-KECAMATAN PONOROGO

Maya Azliana Dewi¹, Mufarrihul Hazin²

¹ Universitas Negeri Surabaya; maya.21031@mhs.unesa.ac.id

² Universitas Negeri Surabaya; mufarrihulhazin@unesa.ac.id

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Guru Penggerak; Kompetensi Guru	Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui tingkat implementasi kebijakan guru penggerak di SMP Negeri Se-Kecamatan Ponorogo (2) mengetahui tingkat kompetensi guru di SMP Negeri Se-Kecamatan Ponorogo (3) mengetahui pengaruh implementasi kebijakan guru penggerak terhadap peningkatan kompetensi guru di SMP Negeri Se-Kecamatan Ponorogo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada 148 responden yang terdiri dari guru dan guru penggerak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat implementasi kebijakan guru penggerak berada dalam kategori sangat baik dengan nilai rata-rata sebesar 84%, yang mencakup empat aspek implementasi berdasarkan teori George C. Edwards III antara lain: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sementara itu, kompetensi guru juga berada pada kategori sangat baik dengan nilai rata-rata 91%, meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial sesuai teori Guza (2008) dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Uji regresi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kompetensi guru, karena nilai t hitung sebesar $6,479 > t$ tabel sebesar $1,976$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima.
Riwayat artikel: Diterima 2025-07-01 Direvisi 2025-07-04 Diterima 2025-07-08	
Maya Azliana Dewi Universitas Negeri Surabaya; maya.21031@mhs.unesa.ac.id	

1. PERKENALAN

Pendidikan hakikatnya merupakan sebuah upaya yang dilaksanakan dengan tujuan menginternalisasi setiap nilai budaya yang ada kedalam jiwa anak, agar nantinya dapat menjadi seseorang yang stabil dan baik dari Rohani maupun jasmani. Pada dasarnya, pendidikan adalah suatu sarana yang ditujukan untuk menciptakan generasi yang terjaga moralnya, serta mampu mengembangkan kecerdasan yang dimiliki baik secara emosional maupun intelektual (Irawati, Masitoh, & Nursalim, 2022). Tokoh pelopor pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara, menggambarkan pendidikan sebagai sebuah proses untuk menuntun anak-anak dalam kehidupannya. Pernyataan ini memiliki makna adalah pendidikan memberikan tuntunan kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak-anak yang dimaksudkan supaya anak menjadi manusia yang mampu

memanusiakan manusia yang lainnya, serta mampu menjadi anggota masyarakat yang dapat meraih kebahagiaan dan keselamatan dengan semaksimal mungkin (Annisa, 2022).

Pendidikan adalah suatu jalan yang memberikan hak untuk manusia yang semakin berkembang serta manusiawi, didasarkan pada selarasnya ikatan yang dimiliki oleh manusia, alam dan lingkungan, serta hubungan dengan sang pencipta. Pendidikan merupakan lingkup yang mampu menerangi jalan yang dilalui oleh seorang manusia, dari zaman terdahulu, saat ini, hingga dimasa yang akan datang (Abdullah, 2022). Tujuan dan harapan tersebut dapat diwujudkan salah satunya dengan meningkatkan kualitas guru yang nantinya akan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan (Hoesny & Darmayanti, 2021). Peranan penting yang dipegang oleh guru guna membina kualitas roda pendidikan yakni bagian dari sistem pendidikan. Tingkat kualitas seorang guru turut menentukan kualitas pendidikan dan kualitas pengajaran. Sebagai pilar utama pendidikan, guru perlu terus meningkatkan kualitasnya. Dengan keberadaan guru berkualitas di sekolah-sekolah Indonesia, mutu pendidikan nasional juga akan meningkat. Guru memegang peran strategis dalam menentukan arah perkembangan pendidikan di tingkat nasional (Veirissa, 2021). Guru yang berkualitas juga akan membimbing serta menghasilkan siswa yang berkualitas. Guru diharuskan dapat beradaptasi agar mengimbangi siswa yang telah terdampak oleh digitalisasi yang sangat pesat. Dengan ini, pada intinya guru yang berkualitas tinggi yang berdampak yang signifikan terhadap bagaimana pendidikan dilaksanakan. Guru tidak hanya kompeten dalam pelajaran yang dipelajari di kelas, tetapi mereka juga mempunyai perilaku baik agar bisa ditiru oleh siswa. Pada akhirnya, kepribadian ini akan berdampak positif pada sikap dan perilaku siswa di sekolah. Bukan hanya itu, guru diharapkan dapat menggunakan metode atau pembelajaran terbaik sesuai dengan siswa yang tidak memaksa, tetapi harus perlahan membuat siswa menyukai pendekatan yang mereka gunakan (Hasanah, Asbari, & Wardah, 2024).

Namun, adanya kualitas guru berikut tidak seimbang dengan realita guru yang ada di lapangan. Kondisi guru di Indonesia bisa diamati bahwa banyak guru yang belum cukup ahli dalam melaksanakan tugasnya. Saat ini, pendidikan di Indonesia membutuhkan guru yang melakukan pekerjaan mereka sebagai seorang pendidik yang bisa membimbing, melatih, mengajar, serta menilai anak didiknya bukan sekadar tuntutan pekerjaan. Merujuk pada ketentuan dalam Undang-undang pasal 39 No 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa guru yaitu tenaga pendidik yang bertanggung jawab untuk merancang dan menjalankan pembelajaran, melakukan pendampingan dan pelatihan, melaksanakan kegiatan penelitian, Pengabdian kepada masyarakat, khususnya bagi pendidik di Perguruan Tinggi. Selain dari tuntutan pekerjaan, adanya anggapan “semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin besar pula biaya yang dibutuhkan” ini sudah menjadi rahasia umum. Dengan mahalnya biaya ini akan berdampak pada tidak meratanya pendidikan di Indonesia serta berbagai aspek yang menunjang kehidupan seperti meningkatnya jumlah pengangguran, angka kemiskinan, kriminalitas, dan sebagainya. Adapun penempatan bidang studi yang tidak selaras dengan keahlian atau bidang pendidikan yang dikuasai oleh guru, berdampak pada optimalisasi guru dalam mengajar. Biasanya ini terjadi pada suatu daerah yang kekurangan guru, sehingga harus ada guru yang bisa merangkap penguasaan bidang studi untuk memenuhi kebutuhan peserta didik (Kurniawati, 2022).

Pada artikel yang ditulis oleh Mawardi, menjelaskan bahwa kompetensi seorang guru di sebuah sekolah yang berlokasi di Kota Sabang masih rendah dalam merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dikarenakan belum memahami apa yang menjadi komponen dalam penyusunan dan pengembangannya secara tepat, serta kurangnya pelatihan dan bimbingan dari pihak yang bersangkutan (Mawardi, 2019). Hal inilah yang menjadi penyebab kurangnya kompetensi guru mulai dari kualitas guru yang ternyata tidak sesuai dengan realita di lapangan, guru mengajar karena tuntutan pekerjaan, tidak meratanya pendidikan di Indonesia, kurangnya guru di daerah tertentu, hingga penguasaan kompetensi yang masih rendah. Dengan ini, Kemendikbud meluncurkan kebijakan guru penggerak untuk memfasilitasi peningkatan kompetensi guru dan kualitas pendidikan di Indonesia.

Guru penggerak merupakan salah satu bentuk dari merdeka belajar, hal ini disampaikan oleh Kemendikbud. Beberapa tindakan strategis yang direncanakan oleh Kemendikbud dalam mengoptimalkan kualitas pendidikan di Indonesia, satu diantaranya yaitu kebijakan guru penggerak. Dengan pelatihan intensif, pengembangan profesional berkelanjutan, dan dukungan penuh, Melalui program ini diharapkan tercipta guru yang memiliki pemikiran yang inovatif, inspiratif, dan mampu menjadi agen perubahan di lingkungan sekolah. Harapannya kebijakan guru penggerak ini dapat menginspirasi guru lainnya untuk meningkatkan metode pengajaran, memberikan suasana belajar yang lebih memadai dan menyenangkan bagi siswa (Abd. Qadir Muslim & Tamim Mulloh, 2022).

Adanya beberapa permasalahan terkait guru penggerak tersebut, penulis melakukan studi pendahuluan terkait kebijakan guru penggerak yang ada di Kabupaten Ponorogo. Menurut hasil yang diperoleh penulis, berikut kebijakan guru penggerak di Kabupaten Ponorogo: 1) Memberikan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi guru, 2) Menugaskan dari guru penggerak menjadi kepala sekolah, 3) Memberikan kesempatan untuk mengikuti pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Guru ke Jabatan Fungsional Pengawas. Satu diantaranya bentuk aktivitas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo dalam meningkatkan kompetensi guru penggerak ini yaitu mengadakan workshop Gerakan Literasi berbasis Digital (GEAR). Dengan adanya pelatihan ini untuk meningkatkan kolaborasi antara guru penggerak dan guru lainnya, memajukan inovasi pendidikan melalui guru penggerak menjadi motivator guru untuk menemukan solusi inovatif atas tantangan yang dialami oleh sekolah dan siswa, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam implementasi pembelajaran yang efektif.

Merujuk pada situasi yang telah diuraikan diatas, penulis merasa terdorong untuk mengangkat kajian yang berjudul: “Pengaruh Implementasi Kebijakan Guru Penggerak Terhadap Peningkatan Kompetensi Guru di SMP Negeri Se-Kecamatan Ponorogo”. Melihat pentingnya fungsi strategis guru penggerak dalam mendorong peningkatan kompetensi guru, kajian ini akan menganalisis sejauh mana implementasi kebijakan Guru Penggerak berkontribusi dalam meningkatkan kompetensi guru di SMP Negeri se-Kecamatan Ponorogo. Tujuannya untuk menyajikan pemahaman yang jelas terkait efektivitas kebijakan tersebut dalam konteks pendidikan lokal dan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan kebijakan pendidikan di masa depan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan judul “Pengaruh Implementasi Kebijakan Guru Penggerak Terhadap Peningkatan Kompetensi Guru di SMP Negeri se-Kecamatan Ponorogo”. Menurut Creswell (2014) Penelitian kuantitatif adalah teknik pengumpulan dan analisis data numerik. Tujuan dari penelitian kuantitatif adalah untuk memberikan gambaran, penjelasan, dan analisis bagaimana variabel berhubungan satu sama lain. Hal ini dapat memberikan pemahaman lebih lanjut terkait fenomena penelitian berdasarkan data yang dapat diukur secara numerik (Ardiansyah, Risnita, & Jailani, 2023). Dalam penelitian kuantitatif, Sugiyono (2013) menyebutkan bahwa keseluruhan wilayah yang menjadi sasaran yang mencakup objek atau subjek yang diteliti dengan karakteristik dan kualitas tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti sebagai dasar untuk analisis dan pengambilan kesimpulan. Populasi penelitian merujuk pada seluruh unit analisis yang memiliki karakteristik serupa atau memiliki keterkaitan dengan isu yang diteliti. Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, penelitian ini memiliki dua variabel utama yaitu Implementasi Kebijakan (X) dan Kompetensi Guru (Y).

Menurut Arikunto (2010), sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang dipilih dan dianggap mampu mewakili keseluruhan populasi dalam suatu penelitian (Amin, Garancang, & Abunawas, 2023). Lokasi yang dipilih pada penelitian ini SMP Negeri yang berada di Kecamatan Ponorogo, karena termasuk salah satu wilayah yang mendukung program nasional dalam pendidikan seperti kebijakan Guru Penggerak. Mengacu pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik), jumlah guru pada tingkat SMP Negeri di Kecamatan Ponorogo adalah sebanyak 234 guru yang tersebar di 6 SMP Negeri di Kecamatan

Ponorogo. Peneliti menggunakan *probability sampling* dengan menerapkan teknik *simple random sampling*, berdasarkan rumus Slovin diperoleh 148 guru sebagai responden.

Pada penelitian ini, Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner atau angket yang disajikan melalui Google Form dengan opsi jawaban menggunakan skala Likert skor 1-4. Dengan menggunakan skala Likert, individu atau kelompok dapat menilai persepsi, sikap, atau pandangan mereka tentang suatu peristiwa atau fenomena sosial (Pratawijaya, Widiatry, Priskila, & Putra, 2019). Teknik analisis data yang digunakan yaitu, uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji linearitas, uji statistik deskriptif, dan uji analisis regresi linear sederhana.

3. TEMUAN DAN DISKUSI

3.1. Temuan

Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dalam penelitian mengikuti distribusi normal. Untuk mengevaluasi distribusi normalitas data, digunakan pengujian *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* terhadap residual dari persamaan. Kriteria pengambilan keputusan didasarkan jika nilai Monte Carlo Sig. $> 0,05$ maka data berdistribusi normal, demikian sebaliknya. Berdasarkan hasil tersebut, nilai Monte Carlo Sig. sebesar $0,254 > 0,05$ dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Residual
N			148
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		11.96558383
Most Extreme Differences	Absolute		.082
	Positive		.082
	Negative		-.058
Test Statistic			.082
Asymp. Sig. (2-tailed)			.016 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		.254 ^d
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.242
		Upper Bound	.265

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

Hasil Uji Linearitas

Uji linearitas dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi keberadaan hubungan yang bersifat linear secara signifikan antara variabel independen dan variabel dependen. Hubungan tersebut dinyatakan linear apabila nilai signifikansi pada indikator linearity menunjukkan angka $< 0,05$. Berdasarkan hasil uji linearitas dari tabel ANOVA berikut, diperoleh nilai Sig. linearity $0.000 < 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linear secara signifikan antara variabel implementasi kebijakan dengan kompetensi guru.

ANOVA Table							
			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kompetensi Guru * Implementasi Kebijakan	Between Groups	(Combined)	20688.872	32	646.527	11.602	.000
		Linearity	6050.435	1	6050.435	108.578	.000
		Deviation from Linearity	14638.437	31	472.208	8.474	.000
	Within Groups		6408.317	115	55.724		
	Total		27097.189	147			

Gambar 2. Hasil Uji Linearitas

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Pengukuran statistik deskriptif variabel ini perlu dilakukan untuk melihat gambaran data secara umum seperti nilai rata-rata (Mean), tertinggi (Max), terendah (Min), dan standar deviasi dari masing-masing variabel yaitu Implementasi Kebijakan (X) dan Kompetensi Guru (Y). Berdasarkan hasil Uji Statistik Deskriptif tersebut, gambaran distribusi data yang peneliti dapatkan yaitu, pada variabel Implementasi Kebijakan (X), dari data tersebut dapat dideskripsikan bahwa nilai minimum yaitu 41 sedangkan nilai maximum sebesar 92, nilai rata-rata variabel implementasi kebijakan yaitu 76,13 dan standar deviasi 8,804. Sedangkan, pada variabel Kompetensi Guru (Y), dari data tersebut dapat dideskripsikan bahwa nilai minimum yaitu 137 sedangkan nilai maximum sebesar 188, nilai rata-rata variabel kompetensi guru yaitu 163,73 dan standar deviasi 13,577.

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Implementasi Kebijakan	148	41	92	76.13	8.804
Kompetensi Guru	148	137	188	163.73	13.577
Valid N (listwise)	148				

Gambar 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Penelitian ini berfokus untuk mengkaji pengaruh antara variabel Implementasi Kebijakan (X) terhadap Kompetensi Guru (Y). Dengan demikian, penelitian ini menggunakan dua variabel utama. Untuk menganalisis hubungan keduanya, peneliti menggunakan metode analisis regresi linier sederhana, yang hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	108.256	8.619		12.559	.000
Implementasi Kebijakan	.729	.112	.473	6.479	.000

a. Dependent Variable: Kompetensi Guru

Gambar 4. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Untuk mengetahui nilai koefisien regresi dalam analisis regresi linier sederhana, digunakan rumus persamaan $Y = a + bX$. Berdasarkan tabel analisis koefisien di atas, nilai a diperoleh dari angka pada kolom Unstandardized Coefficients, yang dalam hal ini bernilai 108,256. Nilai tersebut menunjukkan bahwa apabila tidak terdapat Implementasi Kebijakan (X), maka nilai dasar atau konsistensi Kompetensi Guru (Y) berada pada angka 108,256.

Sementara itu, nilai b merepresentasikan koefisien regresi, yang dalam analisis ini sebesar 0,729. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa setiap peningkatan Implementasi kebijakan (X) maka kompetensi guru (Y) akan meningkat sebesar 0,729. Karena nilai koefisien regresi bernilai plus (+), maka dapat dikatakan bahwa Implementasi kebijakan (X) berpengaruh positif terhadap kompetensi guru (Y). Sehingga persamaan regresinya adalah $Y = 108,256 + 0,729X$. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pada variabel X dan variabel Y.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.473 ^a	.223	.218	12.006

a. Predictors: (Constant), Implementasi Kebijakan

b. Dependent Variable: Kompetensi Guru

Gambar 5. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan besarnya koefisien determinasi R square antara variabel X terhadap Y yaitu sebesar 22,3% hal ini menunjukkan pengaruh regresi antara Implementasi Kebijakan (X) terhadap Kompetensi Guru (Y). Artinya perubahan atau perbedaan yang terjadi pada kompetensi guru dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh implementasi kebijakan guru penggerak sebesar 22,3%. Persentase tersebut mencerminkan kontribusi langsung implementasi kebijakan terhadap peningkatan kompetensi guru. Namun, nilai ini tidak sepenuhnya tinggi karena adanya faktor lain di luar kebijakan yang turut memengaruhi kompetensi guru, seperti pengalaman kerja, pelatihan lainnya, motivasi pribadi, lingkungan sekolah, dan dukungan dari rekan sejawat. Dengan demikian, implementasi kebijakan guru penggerak berpengaruh signifikan terhadap kompetensi guru, masih ada 77,7% faktor lain di luar variabel tersebut yang juga berkontribusi terhadap peningkatan kompetensi guru.

3.2. Diskusi

Tingkat Implementasi Kebijakan Guru Penggerak di SMP Negeri se-Kecamatan Ponorogo

Berdasarkan penelitian dengan hasil penyebaran kuesioner kepada 148 responden yang terdiri dari guru dan guru penggerak di SMP Negeri se-Kecamatan Ponorogo, mayoritas data responden memberikan tanggapan positif terhadap variabel Implementasi Kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian tingkat Implementasi Kebijakan di SMP Negeri wilayah Kecamatan Ponorogo tergolong sangat baik didasarkan pada tingginya persentase guru yang memberikan penilaian pada variabel Implementasi Kebijakan dengan nilai rata-rata sebesar 84%. Hasil analisis angket kuesioner yang disebarkan kepada responden menunjukkan persentase item dengan nilai tertinggi mencapai 90% pada variabel Implementasi Kebijakan dalam pernyataan butir nomor 20. Sedangkan item dengan nilai terendah dalam variabel ini sebesar 81% dalam pernyataan butir nomor 7.

Menurut Edward III, kebijakan akan terlaksana secara efektif apabila terdapat penyampaian informasi yang jelas dan terbuka dari pelaksana kebijakan kepada masyarakat (Posangi, Lengkong, & Dengo, 2020). Komunikasi yang jelas membantu menyampaikan tujuan kebijakan, mengurangi penolakan, serta meminimalkan kesalahan dalam implementasi. Hasil ini selaras dengan temuan penelitian pada sub variabel komunikasi, di mana persentase item dengan nilai tertinggi dari analisis angket kuesioner sebesar 85% terdapat pada butir nomor 1 yang termasuk dalam indikator transmisi, menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan secara terbuka memungkinkan guru memperoleh informasi secara langsung, jelas, dan transparan mengenai tujuan serta mekanisme kebijakan guru penggerak. Ketika komunikasi awal tersampaikan dengan baik, guru akan merasa lebih siap dan terlibat, yang pada akhirnya memperkuat keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Sedangkan item dengan nilai terendah sebesar 81% pada pernyataan butir nomor 7 yang termasuk dalam indikator konsistensi, menunjukkan bahwa sebagian guru belum sepenuhnya mengetahui tindak lanjut dan bentuk dukungan nyata terhadap kebijakan guru penggerak karena kurangnya sosialisasi lanjutan atau komunikasi dari pihak terkait.

Sumber daya menurut Edward III dalam Syahrudin (2018), menjadi satu diantara indikator dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Beberapa aspek yang memengaruhi efektivitas sumber daya antara lain meliputi, sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana (Rahmatillah, Alqarni, & Afrijal, 2023). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian pada indikator sumber daya, di mana persentase item dengan nilai tertinggi dari analisis angket

kuesioner sebesar 86% terdapat pada butir nomor 12 yang termasuk dalam indikator wewenang, dukungan dari kepala sekolah dan dinas pendidikan sebagai bagian dari sumber daya birokratis dirasakan langsung oleh guru. Dukungan ini mencakup penyediaan fasilitas, kebijakan internal sekolah, hingga motivasi yang mendorong kelancaran implementasi kebijakan. Adapun item dengan nilai terendah sebesar 82%, terdapat pada pernyataan butir nomor 9 yang termasuk dalam indikator staf, dapat diartikan bahwa dukungan dari staf pendukung seperti rekan sejawat, pengawas, dan kepala sekolah dirasa belum optimal, kemungkinan karena keterlibatan mereka dalam implementasi kebijakan belum merata atau belum sesuai harapan guru.

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang memberikan kontribusi berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Agar kebijakan dapat dijalankan secara optimal, pelaksana tidak hanya perlu memahami Tindakan yang perlu dijalankan, namun juga perlu memiliki kompetensi dalam melaksanakannya, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat terhindar dari penyimpangan dalam praktiknya (Sunarto, 2021). Hal tersebut selaras dengan penelitian ini, di mana persentase item dengan nilai tertinggi dari analisis angket kuesioner sebesar 88% terdapat pada butir nomor 17 yang termasuk dalam indikator sikap dan komitmen, adanya dukungan administratif yang memadai mencerminkan adanya kesiapan dan kemauan dari pelaksana kebijakan yaitu guru penggerak, untuk menjalankan perannya secara optimal. Dukungan tersebut memperkuat disposisi positif guru dalam melaksanakan kebijakan, sehingga implementasi kebijakan berjalan lebih lancar dan sesuai tujuan. Sementara itu, item dengan nilai terendah sebesar 83% terdapat pada pernyataan butir nomor 14 yang termasuk dalam indikator pemahaman, menunjukkan bahwa belum semua guru merasa terlibat aktif dalam mendukung dan melaksanakan kebijakan guru penggerak, baik karena kurangnya pemahaman, partisipasi langsung, maupun belum merasakan dampak nyata dari kebijakan tersebut di lingkungan sekolah.

Struktur birokrasi mencakup dua aspek utama, yaitu mekanisme atau prosedur operasional standar (SOP) dan struktur organisasi yang mencerminkan pembagian tugas (Laary, Tulusan, & Dengo, 2022). SOP yang disusun dengan baik harus memiliki kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak rumit, dan mudah dipahami oleh semua pihak, karena dokumen ini akan menjadi pedoman bagi para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut selaras dengan penelitian ini, di mana persentase item dengan nilai tertinggi dari analisis angket kuesioner sebesar 90% terdapat pada butir nomor 20 yang termasuk dalam indikator Standar Operating Procedures (SOP), keberadaan SOP berperan dalam menunjang guru menjalankan tugas sebagai guru penggerak. SOP yang jelas dan sistematis memberikan panduan kerja yang terarah, mengurangi kebingungan, serta mempermudah pelaksanaan kebijakan di lapangan. Sedangkan item dengan nilai terendah sebesar 86% dalam pernyataan butir nomor 22 yang termasuk dalam indikator fragmentasi (pembagian tugas), bahwa sebagian guru masih merasakan beban tambahan atau hambatan birokrasi dalam pelaksanaan tugas guru penggerak, baik dari segi pembagian tugas yang belum proporsional maupun sistem birokrasi yang dirasa kurang efisien atau mendukung.

Berdasarkan hasil penelitian di SMP Negeri se-Kecamatan Ponorogo, tingkat implementasi kebijakan Guru Penggerak berada dalam kategori sangat baik, dengan nilai rata-rata sebesar 84%. Hasil analisis menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi didukung oleh empat indikator utama dalam teori George C. Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Item dengan nilai tertinggi termasuk dalam sub variabel struktur birokrasi, menunjukkan bahwa keberadaan SOP sangat membantu pelaksanaan tugas guru penggerak. Sedangkan nilai terendah yang termasuk dalam sub variabel komunikasi mengindikasikan kurangnya pemahaman guru terhadap tindak lanjut dan dukungan kebijakan. Beberapa kendala yang masih ditemukan antara lain dukungan staf pendukung yang belum optimal, keterlibatan guru yang belum merata, dan pembagian tugas serta sistem birokrasi yang dirasa belum sepenuhnya mendukung. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum implementasi kebijakan telah berjalan efektif, perlu adanya penguatan pada aspek komunikasi lanjutan, kolaborasi internal, dan efisiensi birokrasi agar pelaksanaan kebijakan dapat lebih optimal. Dapat

ditarik kesimpulan, implementasi kebijakan Guru Penggerak di SMP Negeri se-Kecamatan Ponorogo telah berjalan secara efektif dan mendapat dukungan dari berbagai aspek yang relevan.

Tingkat Kompetensi Guru di SMP Negeri se-Kecamatan Ponorogo

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kompetensi guru di SMP Negeri se-Kecamatan Ponorogo. Kompetensi guru merupakan salah satu faktor utama yang berpengaruh terhadap kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. Pengukuran kompetensi dilakukan dengan beberapa aspek utama, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian berdasarkan teori Guza (2008) & Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005. Tingkat Kompetensi Guru di SMP Negeri wilayah Kecamatan Ponorogo tergolong sangat baik didasarkan pada tingginya persentase guru yang memberikan penilaian pada variabel Kompetensi Guru dengan nilai rata-rata sebesar 91%. Berdasarkan pengolahan angket responden menunjukkan bahwa persentase item dengan nilai tertinggi sebesar 96% pada variabel kompetensi guru dalam pernyataan butir nomor 40. Sementara item dengan nilai terendah dalam variabel ini sebesar 84% dalam pernyataan butir nomor 26.

Kompetensi pedagogik berperan dalam mengelola pembelajaran dan membangun interaksi antara guru dan peserta didik. Guru yang kompeten secara pedagogik memiliki kemampuan dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan menilai proses pembelajaran secara efektif. Pengelolaan kelas yang efektif memungkinkan proses belajar berlangsung optimal, sehingga capaian pembelajaran dapat diwujudkan (Cahyana & Agustin, 2024). Penelitian tersebut selaras dengan hasil kuesioner ini, di mana persentase item dengan nilai tertinggi dari analisis angket kuesioner sebesar 90% terdapat pada butir nomor 37 yang termasuk dalam indikator komunikasi empatik, ini mencerminkan aspek penting dalam kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan guru membangun komunikasi yang positif dan mewujudkan lingkungan pembelajaran yang nyaman bagi peserta didik. Sikap menghindari nada suara yang kasar atau merendahkan menunjukkan kontrol emosi dan kepedulian guru terhadap kondisi psikologis peserta didik, yang sangat berpengaruh terhadap efektivitas pembelajaran. Sedangkan item dengan nilai terendah sebesar 84% pada pernyataan butir nomor 26 yang termasuk dalam indikator teori pendidikan, menunjukkan bahwa sebagian guru masih mengalami kesulitan dalam mengaitkan teori pembelajaran dengan praktik di kelas, kemungkinan karena keterbatasan pelatihan, waktu, atau pemahaman terhadap pendekatan yang kontekstual.

Kompetensi kepribadian guru, sesuai yang dinyatakan pada Undang-Undang Guru dan Dosen, mencerminkan kualitas pribadi seorang guru yang stabil, dewasa, bijaksana, berwibawa, serta memiliki akhlak mulia (Insani, Rahmawati, & Patriasih, 2020). Kompetensi ini penting karena menunjukkan integritas dan karakter guru sebagai panutan bagi peserta didik. Penelitian tersebut selaras dengan hasil kuesioner ini, di mana persentase item dengan nilai tertinggi dari analisis angket kuesioner sebesar 94% terdapat pada butir nomor 51 yang termasuk dalam indikator etos kerja dan integritas guru, sikap bertanggung jawab menunjukkan kedewasaan, integritas, dan komitmen profesional seorang guru dalam menjalankan perannya. Ketika guru konsisten melaksanakan tanggung jawabnya, hal ini mencerminkan kepribadian yang kuat dan layak dijadikan teladan bagi peserta didik. Adapun item dengan nilai terendah sebesar 91% terdapat pada pernyataan butir nomor 48 yang termasuk dalam indikator stabilitas emosional, menunjukkan bahwa tidak semua guru merasa mampu secara konsisten menjadi teladan, baik dalam sikap maupun perilaku di sekolah dan masyarakat, kemungkinan karena tekanan pekerjaan, kurangnya pembinaan karakter berkelanjutan, atau tantangan dalam menjaga profesionalisme di luar lingkungan sekolah.

Kompetensi profesional adalah kemahiran guru dalam memahami isi pembelajaran secara detail dan menyeluruh, serta mengaitkannya dengan penerapan teknologi digital dalam menunjang proses belajar mengajar. Selain itu, guru juga dituntut mampu membimbing peserta didik sesuai dengan standar nasional Pendidikan (Utami & Hasanah, 2019). Dengan demikian,

guru perlu memiliki pengetahuan yang luas, penguasaan konsep-konsep teoritis, serta kemampuan dalam memilih model, strategi, dan metode pembelajaran yang tepat agar proses belajar mengajar berlangsung efektif. Penelitian tersebut selaras dengan hasil kuesioner ini, di mana persentase item dengan nilai tertinggi dari analisis angket kuesioner sebesar 94% terdapat pada butir nomor 59 yang termasuk dalam indikator kemampuan mengembangkan materi pembelajaran, yang menggambarkan keterampilan guru dalam mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman keseharian peserta didik membuat materi lebih mudah dipahami, yang merupakan inti dari kompetensi profesional. Pendekatan ini tidak hanya menunjukkan penguasaan materi yang baik, tetapi juga kemampuan guru dalam menyampaikan materi secara relevan dan aplikatif, sehingga lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Sementara itu, item dengan nilai terendah sebesar 91% terdapat pada pernyataan butir nomor 61 yang termasuk dalam indikator refleksi berkelanjutan, disebabkan oleh budaya saling memberi dan menerima umpan balik yang belum terbentuk secara optimal di lingkungan sekolah, serta masih adanya rasa enggan atau ketidaknyamanan guru dalam menerima kritik meskipun bersifat membangun.

Menurut Arikunto, kompetensi sosial menuntut guru untuk memiliki keterampilan dalam berkomunikasi secara efektif, baik dengan peserta didik, rekan sesama guru, kepala sekolah, staf administrasi, maupun dengan masyarakat luas (Juhardin, Irawaty, & Momo, 2018). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian ini, di mana persentase item dengan nilai tertinggi dari analisis angket kuesioner sebesar 96% terdapat pada butir nomor 63 yang termasuk dalam indikator sikap adil, mencerminkan inti dari kompetensi sosial, yaitu kemampuan guru dalam membangun hubungan yang adil, inklusif, dan penuh rasa hormat terhadap keberagaman peserta didik. Sikap adil tanpa membedakan latar belakang menunjukkan kepekaan sosial dan profesionalisme guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi semua peserta didik. Sedangkan item dengan nilai terendah sebesar 92% pada pernyataan butir nomor 68 yang termasuk dalam indikator kemampuan adaptasi, mencerminkan masih rendahnya kesadaran atau perhatian sebagian guru terhadap pentingnya sikap inklusif dan apresiatif terhadap keberagaman budaya di lingkungan sekolah dan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disebarkan kepada guru dan guru penggerak di SMP Negeri se-Kecamatan Ponorogo, diketahui bahwa tingkat kompetensi guru secara keseluruhan berada pada kategori sangat baik, dengan nilai rata-rata sebesar 91%. Pengukuran mencakup empat aspek utama: pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Item dengan nilai tertinggi sebesar 96% muncul pada sub variabel kompetensi sosial, yaitu sikap adil terhadap seluruh peserta didik, sedangkan nilai terendah sebesar 84% berasal dari sub variabel kompetensi pedagogik, khususnya dalam mengintegrasikan teori pembelajaran ke praktik kelas. Hal ini menunjukkan bahwa guru telah menunjukkan kompetensi tinggi, terutama dalam bersikap adil, bertanggung jawab, dan mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Namun, masih terdapat beberapa area yang perlu ditingkatkan, seperti kemampuan menghubungkan teori dengan praktik, keterbukaan terhadap umpan balik, serta penghargaan terhadap keberagaman budaya di sekolah. Temuan ini mengindikasikan pentingnya penguatan pelatihan reflektif, pembinaan profesional, dan pengembangan sikap inklusif untuk meningkatkan kompetensi guru secara menyeluruh.

Pengaruh Implementasi Kebijakan Guru Penggerak Terhadap Peningkatan Kompetensi Guru di SMP Negeri se-Kecamatan Ponorogo

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh, diketahui bahwa implementasi kebijakan Guru Penggerak telah berjalan di beberapa SMP Negeri di Kecamatan Ponorogo. Pengaruh implementasi kebijakan terhadap peningkatan kompetensi guru dirasakan secara bertahap namun signifikan. Nilai t hitung sebesar $6,479 > t$ tabel sebesar $1,976$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel Implementasi Kebijakan (X) terhadap variabel Kompetensi Guru (Y).

Hasil penelitian ini sejalan dengan studi terdahulu yang dilakukan oleh (Aulia, Sumardi, Kurniawansyah, & Mustari, 2025) yang membahas Kebijakan Guru Penggerak merupakan inisiatif yang dirancang untuk meningkatkan profesionalisme guru secara berkelanjutan melalui pelatihan dan kegiatan kolaboratif antar guru. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah membekali guru dengan pengetahuan dasar, termasuk kemampuan kepemimpinan dalam pembelajaran serta penguasaan pedagogik, agar mampu mendorong terciptanya lingkungan belajar yang aktif baik di dalam maupun di luar sekolah. Eka (2022) mengungkapkan bahwa rendahnya tingkat kompetensi guru di Indonesia mendorong perlunya langkah strategis, salah satunya melalui kebijakan guru penggerak dengan maksud untuk memperkuat kompetensi guru guna memaksimalkan pencapaian hasil belajar peserta didik. Dengan demikian, temuan dalam penelitian ini mendukung pandangan bahwa Kebijakan Guru Penggerak merupakan langkah yang efektif dalam mendorong peningkatan kompetensi guru dalam mengoptimalkan pencapaian hasil belajar peserta didik.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disebarkan kepada guru dan guru penggerak di SMP Negeri se-Kecamatan Ponorogo, diketahui bahwa tingkat implementasi kebijakan guru penggerak berada dalam kategori sangat baik dengan nilai rata-rata sebesar 84%. Analisis menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi didukung oleh empat faktor dalam teori George C. Edwards III yaitu, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Nilai tertinggi berada pada sub variabel struktur birokrasi, khususnya pada indikator Standar Operating Procedures (SOP), yang terbukti memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung peningkatan kompetensi guru, terutama dalam aspek profesionalisme dan kejelasan pelaksanaan tugas. Sementara itu, nilai terendah ditemukan pada sub variabel komunikasi, yang menunjukkan masih kurangnya pemahaman guru terhadap tindak lanjut dan bentuk dukungan terhadap kebijakan. Oleh karena itu, disarankan agar pihak terkait, seperti Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan, meningkatkan intensitas sosialisasi lanjutan dan komunikasi terbuka agar seluruh guru, termasuk yang bukan peserta langsung, dapat memahami dan terlibat secara aktif dalam implementasi kebijakan guru penggerak.

Pada tingkat kompetensi guru secara keseluruhan berada pada kategori sangat baik, dengan nilai rata-rata sebesar 91%. Pengukuran mencakup empat aspek utama yaitu, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Sub variabel dengan nilai tertinggi terdapat pada kompetensi sosial, yaitu sikap adil terhadap seluruh peserta didik tanpa membedakan latar belakang. Temuan ini memberikan kontribusi signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan guru penggerak, karena menunjukkan kesiapan guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan berkeadilan sesuai dengan semangat program. Sebaliknya, nilai terendah terdapat pada sub variabel kompetensi pedagogik, khususnya terkait kemampuan mengintegrasikan teori pembelajaran ke dalam praktik kelas. Oleh karena itu, disarankan agar pelatihan lanjutan yang bersifat praktis dan kontekstual difokuskan pada peningkatan kemampuan guru dalam menerapkan teori ke praktik, agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih optimal dan merata.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel Implementasi Kebijakan (X) terhadap variabel Kompetensi Guru (Y). Kontribusi nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 22,3%. Meskipun pengaruhnya tidak terlalu tinggi, hal ini disebabkan karena faktor lain di luar kebijakan yang turut memengaruhi kompetensi guru, seperti pengalaman kerja, pelatihan lainnya, motivasi pribadi, lingkungan sekolah, dan dukungan dari rekan sejawat. Dengan demikian, implementasi kebijakan guru penggerak berpengaruh signifikan terhadap kompetensi guru, masih ada 77,7% faktor lain di luar variabel tersebut yang juga berkontribusi terhadap peningkatan kompetensi guru. Dengan demikian, implementasi kebijakan guru penggerak secara simultan berpengaruh terhadap peningkatan kompetensi guru di SMP Negeri se-Kecamatan Ponorogo.

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Guru Penggerak di SMP Negeri se-Kecamatan Ponorogo berada dalam kategori sangat baik dengan nilai rata-rata sebesar 84%. Keberhasilan ini didukung oleh empat indikator utama dalam teori George C. Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, di mana keberadaan Standar Operating Procedures (SOP) memberikan kontribusi signifikan dalam memperjelas tugas dan mendukung profesionalisme guru. Di sisi lain, tingkat kompetensi guru juga tergolong sangat baik dengan nilai rata-rata 91%, mencakup empat aspek utama: pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial, sebagaimana dirumuskan dalam teori Guza (2008) dan UU Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005. Implementasi kebijakan Guru Penggerak terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kompetensi guru, terutama dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, adil, dan profesional, meskipun masih ditemukan kendala dalam aspek komunikasi. Hal ini diperkuat dengan hasil uji t dan koefisien determinasi (R^2) sebesar 22,3%, yang menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki kontribusi terhadap peningkatan kompetensi guru, meskipun masih terdapat 77,7% faktor lain di luar variabel tersebut yang turut memengaruhi.

REFERENSI

- Abd. Qadir Muslim, & Tamim Mulloh. (2022). Analisis Kebijakan Program Guru Penggerak Sebagai Upaya Regenerasi Supervisor Pendidikan Yang Berkualitas Di Indonesia. *Journal Publicuho*, 5(3), 790–801. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.28>
- Abdullah, M. (2022). Lembaga Pendidikan Sebagai Suatu Sistem Sosial (Studi Tentang Peran Lembaga Pendidikan di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional). *Mamba'ul'Ulum*, 38–48.
- Amin, N. F., Garancang, S., & Abunawas, K. (2023). Konsep Umum Populasi dan Sampel dalam Penelitian. *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 14(1), 15–31.
- Annisa, D. (2022). Pengertian Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(1980), 1349–1358.
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(Vol. 1 No. 2 (2023): 2023), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Aulia, A., Sumardi, L., Kurniawansyah, E., & Mustari, M. (2025). Implementasi Kebijakan Program Guru Penggerak (Studi di Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 10(2), 1165 – 1173. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jipp.v10i2.3376>
- Cahyana, C., & Agustin, M. (2024). Kompetensi Pedagogik Guru Kelas: Perencanaan, Penerapan dan Evaluasi dalam Pembelajaran. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6(1), 844–851. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i1.5962>
- Hasanah, I. M., Asbari, M., & Wardah, H. (2024). Guru Berkualitas Esensi Pendidikan Bermutu.pdf. *Journal of Information Systems and Management*.
- Hoesny, M. U., & Darmayanti, R. (2021). Permasalahan dan Solusi untuk Meningkatkan Kompetensi dan Kualitas Guru : Sebuah Kajian Pustaka. *Scholaria : Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 11(2), 123–132. Retrieved from <https://ejournal.uksw.edu/scholaria/article/view/3595>

- Insani, A., Rahmawati, Y., & Patriasih, R. (2020). Pemahaman Kompetensi Kepribadian Guru Pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Tata Boga. *Jurnal Media, Pendidikan, Gizi Dan Kuliner*, 9(2), 9–14.
- Irawati, D., Masitoh, S., & Nursalim, M. (2022). Filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara sebagai landasan pendidikan vokasi di era kurikulum merdeka. *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala*, 7(4).
- Juhardin, L. O., Irawaty, & Momo, A. H. (2018). Kompetensi Sosial Guru PKN di SMA Negeri 5 Wangi-Wangi. *Selami IPS*, 4(48), 324–335.
- Kurniawati, F. N. A. (2022). Meninjau Permasalahan Rendahnya Kualitas Pendidikan di Indonesia dan Solusinya. *Academy of Education Journal*, 13(1), 1–23.
- Laary, Y., Tulusan, F. M. G., & Dengo, S. (2022). Implementasi Kebijakan Keamanan Dan Ketertiban Di Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(120), 60–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.17509/boga.v9i2.33010>
- Mawardi, M. (2019). Optimalisasi Kompetensi Guru Dalam Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. *JURNAL ILMIAH DIDAKTIKA: Media Ilmiah Pendidikan Dan Pengajaran*, 20(1), 69. <https://doi.org/10.22373/jid.v20i1.3859>
- Posangi, H. A., Lengkong, F. D. J., & Dengo, S. (2020). Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(94).
- Pratawijaya, V. H., Widiatry, Priskila, R., & Putra, P. B. A. A. (2019). Penerapan Skala Linkert dan Skala Dikotomi pada Kuesioner Online. *Jurnal Sains Dan Informatika*, 5(<https://jsi.politala.ac.id/index.php/JSI/issue/view/11>), 128–137. <https://doi.org/https://doi.org/10.34128/jsi.v5i2.185>
- Rahmatillah, A., Alqarni, W., & Afrijal. (2023). Implementasi Program Aceh Green Ditinjau dari Perspektif Teori Implementasi Kebijakan Edward III. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK*, 8(3).
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sunarto. (2021). Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Kearsipan pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 3(2), 97–112.
- Utami, I. H., & Hasanah, A. (2019). Kompetensi Profesional Guru dalam Penerapan Pembelajaran Tematik di SD Negeri Maguwoharjo 1 Yogyakarta. *Pionir: Jurnal Pendidikan*, 8(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/pjp.v8i2.6232>
- Veirissa, A. H. (2021). *Kualitas Guru di Indonesia.pdf*. Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana.